TANGGAPI PERNYATAAN ANGGOTA OMBUDSMAN, PENGURUS WILAYAH IPPAT JAWA TENGAH SAMBANGI OMBUDSMAN JAWA TENGAH

Rabu, 14 Maret 2018 - Sabarudin Hulu

Semarang - Ombudsman Jawa Tengah menerima audiensi Pengurus Wilayah IPPAT Jawa Tengah pada hari Selasa (13/3) bertempat di Kantor Ombudsman Jawa Tengah. Audiensi diajukan Pengurus Wilayah IPPAT Jawa Tengah menyusul pernyataan Anggota Ombudsman di media yang mensinyalir banyak jebakan OTT ditujukan kepada pejabat BPN di wilayah yang dilakukan oleh notaris.

Merespon pernyataan tersebut, Ketua Pengurus Wilayah IPPAT Jawa Tengah, Siswoyo dan jajaran menyampaikan bahwa peristiwa OTT di BPN Kota Semarang dapat menjadi pembelajaran bagi institusi tersebut. Namun, Siswoyo menyayangkan pernyataan Anggota Ombudsman yang menyangkutpautkan OTT tersebut dengan oknum Notaris. Menurutnya, tidak ada niat Notaris untuk menjebak, justru Notaris dan PPAT berharap pelayanan publik di BPN dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ombudsman Jawa Tengah menyambut baik kritik dan saran yang disampaikan oleh IPPAT Jawa Tengah. Pada kesempatan tersebut, dilaksanakan diskusi terkait pelayanan BPN di wilayah Jawa Tengah. Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah, Sabarudin Hulu juga menjelaskan kewenangan Ombudsman dalam melakukan pengawasan pelayanan publik.

Dalam kesempatan yang sama, IPPAT Jawa Tengah menyampaikan harapan agar Ombudsman dapat mendorong BPN untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Perbaikan pelayanan BPN untuk mencegah pungutan liar oleh oknum kepada notaris/PPAT maupun masyarakat sebagai pengguna layanan menurutnya dapat dilakukan dengan beberapa hal, antara lain: membangun pelayanan sistem online dan mengurangi tatap muka antara pelaksana layanan dengan pengguna layanan, seperti pelayanan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Saran dan solusi perbaikan tersebut sejatinya telah disampaikan IPPAT Jawa Tengah kepada BPN, akan tetapi hingga saat ini pihak BPN belum mengakomodirnya.

Sejalan dengan harapan perbaikan pelayanan bidang pertanahan, Ombudsman Jawa Tengah meminta Pengurus IPPAT Jawa Tengah untuk ikut mengawasi dan melaporkan apabila menemukan praktek-praktek maladministrasi serta penyimpangan pada pelayanan di BPN, baik wilayah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Plt. Kepala Ombudsman Jawa Tengah, Sabarudin Hulu menegaskan, "Apabila Notaris/PPAT ragu-ragu dan khawatir terhadap dampak laporan pengaduannya, Ombudsman dapat merahasiakan identitas yang bersangkutan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia."

Sebelumnya, Ombudsman Jawa Tengah pernah bekerja sama dengan pihak Notaris ketika melakukan investigasi terhadap dugaan pungutan liar dan penundaan berlarut oleh petugas BPN dalam penerbitan sertipikat. Pengaduan masyarakat terkait pelayanan BPN yang meningkat tiap tahun juga menjadi fokus perhatian Ombudsman.

Menyikapi hasil audiensi, IPPAT Jawa Tengah berkomitmen untuk bekerja sama dan bersinergi dengan Ombudsman Jawa Tengah dalam mendorong perbaikan pelayanan publik, utamanya yang diselenggarakan oleh BPN di wilayah Jawa Tengah. Ombudsman Jawa Tengah mendukung komitmen tersebut dan menyambut baik kerja sama untuk memberantas maladministrasi dalam pelayanan pertanahan, khususnya terkait pungutan liar. "Ombudsman bersinergi dengan semua pihak termasuk Notaris/PPAT dalam mencegah maladministrasi di Kementerian/Lembaga termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN," tutup Sabarudin.Â